

PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMBINAAN UMAT BERAGAMA DI KOTA MEDAN

Wirman¹, Khairil Ihsan², Ibnu Zulkhoir³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

E-mail : *ihsankhairil21@gmail.com*

Abstrak

Partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisasir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan citacita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melkaskan programnya. Sedangkan menurut Giovanni Sartori partai politik adalah suatu kelompok poloitik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatn-jabatan politik. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengungkap data-data yang di uraikan oleh sumber data dan partisipan untuk mengetahui mengenai bagaimana aspek teknologi dalam jaringan kerja sama perpustakaan dan informasi perpustakaan digital di kota Medan, untuk memperoleh hasil yang berkualitas dari penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa Peran partai politik dalam pembinaan kerukunan umat beragama di kota Medan, tercermin dari partisipasi aktif aktor dari partai politik yang berkecimpung langsung dan turut andil dalam kegiatan pembinaan kerukunan umat bergama kota Medan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Medan.

Kata Kunci : Peran, Partai Politik, Kerukunan

Abstract

A political party is an organized group of people whose members have the same orientation, values, and ideals. The purpose of this group is to gain political power and seize political positions (usually) by constitutional means to carry out its program. Meanwhile, according to Giovanni Sartori, a political party is a political group that participates in general elections and, through these elections, is able to place its candidates to occupy political positions. The researcher uses a qualitative approach with the aim of uncovering the data described by data sources and participants to find out about how the technological aspects of the library cooperation network and digital library information in the city of Medan, to obtain quality results from

the research conducted. The results of this study resulted that the role of political parties in fostering religious harmony in the city of Medan, is reflected in the active participation of actors from political parties who are directly involved and take part in the activities of fostering religious harmony in the city of Medan through the Medan City Religious Harmony Forum (FKUB).

Keywords: Role, Political Parties, Harmony

PENDAHULUAN

Semenjak dini orang wajib hidup bernegara, orang tidak dapat bebas dari negeri, alhasil watak itu ialah akibat orang selaku zoon politicon, makhluk yang tidak dapat bebas dari politik. Orang selaku zoon politicon tidak dapat menjauh buat berpolitik dalam maksud turut jadi badan sesuatu negeri. Sesuatu negeri tentu mempunyai sesuatu sistem politik yang berjalan serta bertumbuh didalamnya. Politik kerap didefinisikan selaku pemakaian kewenangan ataupun wewenang, sesuatu pembuatan ketetapan dengan cara beramai-ramai, sesuatu pangkal energi yang tahap ataupun selaku arena pertarungan kebutuhan (Faidi, 2018).

Partai politik ialah segerombol orang yang terorganisasir yang anggota-anggotanya memiliki arah, nilai-nilai, serta perasaan perasaan yang serupa. Tujuan golongan ini yakni buat mendapatkan kewenangan politik serta meregang peran politik(umumnya) dengan metode

konstitusional buat melkasnakan programnya. Sebaliknya bagi Giovanni Sartori partai politik merupakan sesuatu golongan poloitik yang menjajaki penentuan biasa serta, lewat penentuan biasa itu sanggup menaruh calon- calonya buat mendiami jabatn-jabatan politik. Bagi Edmund Burke(2005) partai politik merupakan badan yang terdiri dari atas banyak orang yang bersuatu, buat mempermosikan kebutuhan nasional dengan cara bersama- sama, bersumber pada prinsip- prinsip serta keadaan yang mereka setujuai. Bagi Lapalombara serta Anderson(1992) partai politik merupakan tiap golongan politik yang mempunyai merek serta badan sah yang mengaitkan antara pusat kewenangan dengan lokalitas, yang muncul dikala pemelihan biasa, serta mempunyai kemmapuan buat menmpatkan calon administratur khalayak lewat aktivitas penentuan biasa, bagus leluasa ataupun tidak leluasa (Kontiarta, 2018).

Islam membenarkan orang selaku insan berfikir yang inovatif.

Kreatifitas itu butuh tertuju buat pengaturan kehidupan orang, yang antara lain, lewat pengerukan serta kategorisasi aturan- aturan hukum Al-qur' an memiliki selengkap aturan angka etika serta hukum bernegara yang bisa di peruntukan prinsip dalam penajaan pemerintahan Negeri. Wujud serta sistem pemerintahan negeri diserahkan pada orang buat memutuskan serta mengaturnya. Abdurrahman Taj menerangkan dengan berkata: Tiap pemeluk (bangsa) di bermacam arah bumi ini (bisa) memiliki politik serta hukum-hukum khusus yang cocok dengan adat, aturan kehidupan, serta tingkatan perkembangan (Sari, n.d.).

Indonesia jadi salah satu negeri di bumi yang mempunyai berbagai macam agama, adat serta etnik yang tidak dipunyai oleh tiap negeri. Kedamaian itu bisa jadi daya sekalian berpotensi tumbuhnya tindakan keyakinan kepada tiap- tiap kalangan yang menimbulkan bentrokan dampingi anak bangsa. Warga multikultural ialah bakat dari Tuhan YME yang wajib dilindungi dengan sebaik- baiknya. Pasti situasi itu jadi kewajiban kita seluruh kalau kita wajib berlagak keterbukaan kepada perbandingan yang terdapat di warga Indonesia.

Kenyataan yang begitu bisa disimpulkan kalau tantangan Indonesia kedepan amat berat buat melindungi aman, keamanan serta

kemantapan politik. Dalam perspektif agama, kedamaian agama ialah bakat dari Tuhan YME, pasti kita selaku hamba tidak bisa menyangkal kalau Tuhan telah berangan- angan, diciptakanlah beraneka ragam agama, kaum, etnik biar dampingi orang dapat jadi energik, silih berlatih serta tumbuhnya keterbukaan dampingi pemeluk berkeyakinan (Utami, 2013).

Berusia ini intoleransi dampingi kalangan yang ditemui dalam potret sebagian permasalahan dalam cara kerakyatan jadi menarik diulas, sebab dalam perhelatan penentuan kepala wilayah(Pilkada) banyak sekali ditemui politik bukti diri. Di Indonesia politik bukti diri sudah lama jadi poin dialog di golongan para pakar ilmu sosial. Clifford Geertz(1963) catatan mengenai“ Primordial Sentiment” berkata kalau riset mengenai politik bukti diri hendak lalu jadi atensi sungguh- sungguh kuncinya berhubungan dengan etnik, warga pribumi(indigenous community) serta warga lokal(local community). Permasalahan politik bukti diri sebagian tahun yang kemudian pula luang jadi kesedihan seluruh pihak kalau berjalan penentuan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017. Survey Populi Center sehabis pilkada DKI Jakarta putaran awal, ditemui kalau rumor sara dipergunakan buat perlengkapan kampanye biar memilah calon gubernur mukmin serta permasalahan yang lain ialah tidak

hendak disholatkan jenazah yang memilah calon gubernur non mukmin, situasi itu pasti membuat warga yang memiliki hak politik buat ikut serta dalam cara kerakyatan merasa terintimidasi (Kontiarta, 2018).

Bangsa Indonesia terdiri atas bermacam berbagai kaum, bahasa, adat serta agama. Keanekaan kaum, bahasa, adat serta agama pada hakikatnya malah memperkaya khasanah adat bangsa. Salah satu bentuk adat Indonesia itu merupakan adat kebatinan yang bersumber pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Satu, yang pada dasarnya merupakan peninggalan kakek moyang adat bangsa. Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Satu selaku salah satu pandangan peninggalan adat bangsa(adat kebatinan) dengan cara realistis sedang hidup serta bertumbuh dan dihayati oleh beberapa warga Indonesia. Dengan cara historis sosiologis, agama ialah sesuatu kenyataan, informasi, serta kejadian yang dapat dikaji dengan cara objektif. Tidak hanya itu, agama pula jadi keinginan yang pokok untuk keberadaan orang di bumi. Perihal ini diakibatkan oleh karakter orang yang menginginkan, pasti dengan cara bakat hendak kehadiran Yang Bersih. Keinginan pokok itu kemudian terejawantah serta dibangun dalam sesuatu sistem dengan bermacam fitur ketentuan yang terdapat di dalamnya,

yang setelah itu diucap selaku agama (Di & Cirebon, 2021).

Akibat hendak kedatangan agama ini turut dan dalam membuat dan memastikan pola berfikir serta tindakan hidupnya. Warga yang berkeyakinan bagus mukmin ataupun non- muslim kerap kali berlagak khusus, mereka merasa kalau cuma anutan agama merekalah yang bisa bawa serta membagikan keamanan. Agama mengarahkan bukti pada tiap pemeluknya, serta bawa tujuan keamanan untuk semua umatnya. Sedemikian itu pula tidak satupun agama di bumi ini yang mengarahkan ataupun menyarankan pada pemeluknya buat melaksanakan kekacauan, silih melawan, terlebih silih menewaskan. Hidup bermasyarakat pastinya ketahui sebenarnya uraian kepada agama tidak semunya global, perihal ini lazim diucap dengan watak agama orang biasa. Keberagamaan kultur agama yang bebuyutan maksudnya ia cuma beriktikad apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, tanpa menelaah lagi apakah amatan itu betul ataupun salah dan mereka tidak terdapat benak buat memperdalam anutan peninggalan itu, perihal yang terutama mereka jalani merupakan gimana mereka dapat melestarikan apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, tanpa kurangi sedikitpun.

Dalam hal ini, dalam keberagaman bangsa yang beragam,

perlu adanya peran yang konkret dalam partai politik sebagai pendamping pembinaan umat beragama. Dengan demikian, menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Partai Politik Dalam Pembinaan Umat Beragama di Kota Medan”**

TINJAUAN PUSTAKA

Partai Politik

Partai politik mempunyai kedudukan yang amat berarti dalam sesuatu negeri kerakyatan. Negeri dijalani bersumber pada kemauan serta keinginan orang. Badan negeri pada hakikatnya dilaksanakan oleh orang sendiri ataupun paling tidak atas persetujuan orang sebab kewenangan paling tinggi ataupun independensi terletak di tangan orang. Oleh sebab itu, ketentuan penting penerapan kerakyatan merupakan terdapatnya badan perwakilan yang dibangun lewat penentuan teratur serta menginginkan terdapatnya independensi politik supaya penentuan itu betul- betul berarti.

Partai politik ialah salah satu wujud konkretisasi independensi berekanaan selaku salah satu prasyarat berjalannya kerakyatan. Independensi berekanaan lahir dari kecondongan bawah orang buat hidup bermasyarakat serta berorganisasi bagus dengan cara resmi ataupun informal. Kecondongan begitu itu ialah sesuatu keniscayaan. Kecondongan

bermasyarakat yang pada perinsipnya merupakan kehidupan berorganisasi mencuat buat penuhi keinginan serta kepentingan- kepentingan yang serupa dari individu- individu dan buat menggapai tujuan bersama bersumber pada pertemuan benak serta batin batin.

Edmund Burke mendeskripsikan partai politik selaku satu kesatuan bentuk badan yang bermaksud buat mnyebarluaskan usaha- usaha yang sudah jadi perjanjian diantara mereka buat kebutuhan nasional. Dengan metode yang serupa, Ware(1996: 5) mengutip kesimpulan kalau partai politik ialah suatu badan yang pengaruhi negeri dengan metode memahami jabatan- jabatan penting dalam rezim. Umumnya, partai politik memiliki lebih dari hanya satu kebutuhan serta berupaya mengupayakan kebutuhan itu. Untuk Budirdjo(2007: 160- 161), partai politik merupakan suatu golongan yang terorganisir dimana anggota- anggotanya mempunyai arah, nilai- nilai dan angan- angan yang serupa. Tujuan golongan ini merupakan memperoleh kewenangan, politik serta meregang peran politik dengan cara konstitusional untuk melakukan kebutuhan(kebijaksanaan) mereka (Anshori et al., 2021).

Kerukunan Umat Beragama

Dalam penafsiran tiap hari tutur damai serta aman merupakan rukun serta perdamaian. Dengan penafsiran

ini nyata, kalau tutur aman cuma dipergunakan serta legal dalam bumi pergaulan. Aman dampingi pemeluk berkeyakinan merupakan metode ataupun alat buat mempertemukan, menata ikatan luar antara orang yang tidak seagama ataupun antara kalangan pemeluk berkeyakinan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan (Rohmah, 2020).

Sebutan kerukunan umat beragama awal kali dikemukakan oleh Menteri Agama, K. H. Meter. Dachlan, dalam ceramah awal Konferensi Dampingi Agama bertepatan pada 30 Nopember 1967 antara lain melaporkan: " Terdapatnya aman antara kalangan berkeyakinan merupakan ialah ketentuan telak untuk terwujudnya kemantapan politik serta ekonomi yang jadi program Dewan menteri AMPERA. Jadi bisa disimpulkan kalau aman yakni hidup rukun serta tentram silih keterbukaan antara warga yang berkeyakinan serupa ataupun berlainan, kemauan mereka buat menyambut terdapatnya perbandingan agama dengan orang ataupun golongan lain, membiarkan orang lain buat mengamalkan anutan yang dipercayai oleh tiap- tiap warga, serta keahlian buat menyambut perbandingan.

Aman berarti akur dalam perbedaan- perbedaan yang terdapat serta menghasilkan perbedaan- perbedaan itu selaku titik dorong buat membina kehidupan sosial yang silih

penafsiran dan menyambut dengan integritas batin yang penuh keikhlasan. Aman memantulkan ikatan timbal balik yang diisyarati oleh tindakan silih menyambut silih menyakini, silih meluhurkan serta menghormati, dan tindakan silih memaknai kebersamaan. Bersumber pada pemaparan di atas hingga penafsiran dari aman pemeluk berkeyakinan merupakan situasi dimana dampingi pemeluk berkeyakinan bisa silih menyambut, silih meluhurkan agama masing masing, silih bantu membantu, serta berkolaborasi dalam menggapai tujuan bersama.

METODE PENELITIAN

Riset ini memakai tipe riset deskriptif, yang maksudnya cerminan dengan cara analitis, aktual, serta cermat hal fakta- fakta, sifat- sifat dan ikatan antara kejadian yang diselidiki. Riset yang memakai tipe deskriptif merupakan riset yang dimaksudkan buat menggambarkan, melukiskan, ataupun menguraikan kondisi subjek yang diawasi hal gimana peran partai politik dalam pembinaan umat beragama di kota Medan..

Dalam teknik pengumpulan data, periset memakai metode tanya jawab tidak tertata pada riset ini. Metode tanya jawab tidak tertata ialah metode yang bila terdapat balasan yang tidak cocok pertanyaan- pertanyaan yang sudah disiapkan

hingga bisa mencuat persoalan lain. Tanya jawab ini dicoba buat memperjelas balasan dari seluruh kesimpulan permasalahan yang ada. Selain itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi guna memantau dan meneliti bagaimana peran partai politik dalam pembinaan umat beragama di kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil serangkaian proses penelitian, dapat ditarik hasil dan pembahasan kalau Islam menjunjung besar keterbukaan. Keterbukaan membidik pada tindakan terbuka serta ingin membenarkan terdapatnya bermacam berbagai perbandingan, bagus dari bagian kaum bangsa, warna kulit, bahasa, adat- istiadat, adat, bahasa, dan agama. Ini seluruh ialah bakat serta sunnatullah yang telah jadi ketetapan Tuhan. Dalam terminologi Islam, sebutan yang dekat dengan aman pemeluk berkeyakinan merupakan tindakan silih menguasai, silih meluhurkan, serta silih menghormati selaku sesama orang. Kesabaran muat aksi pendapatan serta desakan dalam batas- batas khusus. Dengan tutur lain, sikap kesabaran dalam berkeyakinan mempunyai penafsiran buat tidak silih melanggar batas, paling utama yang berhubungan dengan batas keagamaan(aqidah). Rancangan keterbukaan berkeyakinan dalam Islam tidaklah membetulkan serta membenarkan seluruh agama

serta agama yang terdapat dikala ini, sebab ini ialah perkara kepercayaan serta keagamaan yang wajib dilindungi dengan bagus oleh tiap individu mukmin. Keterbukaan bukan membenarkan seluruh agama serupa, terlebih membetulkan aturan metode ibadah pemeluk berkeyakinan lain. Tidak terdapat keterbukaan dalam perihal kepercayaan serta ibadah. Sebab sebetulnya untuk orang Islam agama yang diridhai di bagian Allah cumalah Islam. Keterbukaan cumalah dalam hal muamalah serta kehidupan sosial.

Kota Medan merupakan kota multikultural yang terdiri dari berbagai kaum, agama, serta suku bangsa yang pada hakikatnya perbandingan ini tidak jadi boomerang untuk masyarakat kota Area, tetapi perbandingan ini jadi parafin dari buah aman serta keanekaan. Kota Area ialah kota yang lapang dada yang terdapat di Indonesia, karenannya masyarakatnya yang multikultural tetapi dapat dengan cara berdampingan hidup rukun serta aman.

Peran partai politik dalam pembinaan kerukunan umat beragama di kota Medan, tercermin dari partisipasi aktif aktor dari partai politik yang berkecimpung langsung dan turut andil dalam kegiatan pembinaan kerukunan umat bergama kota Medan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Medan.

Kota Medan ialah kota dengan warga yang plural dari bidang etnisitas serta pula agama. Kota Area pula disebut- sebut selaku kota yang masyarakatnya hidup serasi dalam keterbukaan berkeyakinan. Perihal ini dapat diamati dari rumah ibadah yang berdiri di tengah- tengah warga, beberapa terdapat yang berdampingan antara rumah ibadah dari pemeluk yang satu dengan yang yang lain, namun perihal itu tidak mengakibatkan suatu gesekan bentrokan. Forum Aman Pemeluk Berkeyakinan(FKUB) dibangun dengan tujuan buat melindungi kemesraan sosial yang dikala ini sedang terangkai dengan bagus dalam warga Kota Medan.

Periset menciptakan kalau keenam pemeluk agama ialah Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Buddha serta Konghuchu hidup serasi berdampingan dalam satu area yang serupa ialah Kota Area. Perihal ini dapat diamati dari aktivitas FKUB yang senantiasa melangsungkan sesuatu perbincangan dengan mengundang warga rute agama. Warga Kota Area dari keenam agama itu terkumpul dalam sesuatu perbincangan yang diadakan FKUB dengan tujuan buat silih menguasai agama yang satu dengan yang lain dengan metode bertukar pikiran. Perihal inilah yang menghasilkan FKUB amat berfungsi berarti dalam melindungi kemesraan masyarakatnya, sebab mereka

senantiasa menuntaskan permasalahan yang terdapat dengan metode bertukar pikiran dalam suatu perbincangan yang bertabiat tembus pandang. Cuma saja kerap timbul pergesekan bentrokan di dikala salah satu pemeluk mendirikan rumah ibadah tanpa mempunyai permisi sah dari penguasa yang dianjurkan oleh FKUB. Disinilah posisi kedudukan FKUB dalam melaksanakan tugasnya selaku pelopor kemesraan sosial.

SIMPULAN

Dari rangkaian hasil dan wawancara dapat disimpulkan bahwa Kota Medan merupakan kota dengan warga yang plural dari bidang etnisitas serta pula agama. Kota Area pula disebut- sebut selaku kota yang masyarakatnya hidup serasi dalam keterbukaan berkeyakinan. Perihal ini dapat diamati dari rumah ibadah yang berdiri di tengah- tengah warga, beberapa terdapat yang berdampingan antara rumah ibadah dari pemeluk yang satu dengan yang yang lain, namun perihal itu tidak mengakibatkan suatu gesekan bentrokan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dibangun dengan tujuan buat melindungi kemesraan sosial yang dikala ini sedang terangkai dengan bagus dalam warga Kota Area.

Kedudukan partai politik dalam pembinaan aman pemeluk berkeyakinan di kota Area, terlihat dari kesertaan aktif bintang film dari partai politik yang berkecimpung langsung

serta ikut berperan dalam aktivitas pembinaan aman pemeluk beragama kota Medan lewat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Medan..

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A., Adhani, A., & Nasution, N. (2021). *Pengaruh Relasi Budaya dalam Pesan dan Saluran Politik terhadap Sikap Pemilih: Studi Kasus di Pilkada Kota Medan Tahun 2020* *The Influence of Cultural Relations in Messages and Political Channels on Voters' Attitudes: A Case Study of the 2020 Medan Mayoral Election*. 22(2), 177–188.
- Di, I., & Cirebon, K. (2021). *Jurnal ilmiah publika*. 9, 240–245.
- Faidi, A. (2018). Sistem Kekhalifahan dan Konstruksi Budaya Politik Arab. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 13(1), 187–204. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1478>
- Kontiarta, I. W. (2018). *KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PROVINSI BALI*. 12(1), 99–132.
- Rohmah, S. (2020). *Menjembatani Misi Proselitisasi Islam- Kristen dan Keharusan Merawat Kerukunan: Konstruksi Teologis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang*. 2(01), 55–68.
- Sari, E. (n.d.). *Efektivitas Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat*

Beragama (FKUB) dalam Pencegahan Konflik Keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu *Communication Effectiveness of Religious Harmony Forum (FKUB) in Preventing Religious Conflict in Labuhanbatu District*. 325–364.

- Utami, N. W. (2013). *Upaya Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Resolusi Konflik Ahmadiyah*. 61–72.